

JURNAL KAJIAN MEDIA

Vol. 1 No. 2

Desember 2017

Halaman 111 - 121

Analisis Wacana Kritis Konsepsi Relasi Agama dan Negara Hizbut Tahrir Indonesia

Mufatihatul Islam, Sudono Syueb

Universitas dr. Soetomo
sudono.syueb@unitomo.ac.id

Abstrak

Salah satu Organisasi keagamaan politik yang pengaruhnya cukup kuat adalah Hizbut Tahrir Indonesia dengan Wacana Politik Islam Khilafah Islamiyah. Wacana politik yang di angkat oleh Hizbut Tahrir tentulah menuai kontroversi di Indonesia yang statusnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada ideologi pancasila. Berbagai macam upaya di upayakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia untuk menegakkan wacana politiknya hingga merambah media komunikasi massa seperti, majalah, tabloid maupun buletin mingguan. Konstruksi berita yang sedemikian rupa juga selalu di rangkai semenarik dan sepersuasif mungkin hingga dapat mempengaruhi pembacanya.

Analisis wacana kritis adalah model analisis teks media yang akan mengkonstruksi bagaimana sebuah media menuliskan beritanya , melalui analisis wacana kritis akan diketahui sebuah maksud dari penulisan berita tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkonstruksi muatan berita pada majalah Al Wa'ie milik Hizbut Tahrir Indonesia khususnya pada berita "Relasi Agama dan Negara" pada Rubrik Afkar.

Kata Kunci: Analisis Wacana, Hizbut Tahrir Indonesia, Politik.

Abstract

One of the political religious organizations whose influence is strong enough is Hizbut Tahrir Indonesia with Islamic Political Discourse Khilafah Islamiyah. The political discourse adopted by Hizb ut-Tahrir certainly reap the controversy in Indonesia whose status is the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on the ideology of Pancasila. Various efforts were made by Hizbut Tahrir Indonesia to enforce its political discourse to penetrate mass communication media such as magazines, tabloids and weekly bulletins. The construction of news in such a way is also always in the sequence as interesting and sepersuasif possible as to influence its readers.

Critical discourse analysis is a model of media text analysis that will construct how a medium writes its message, through critical discourse analysis to know the purpose of writing the news. In this study, researchers will construct news content on Al Wa'ie magazine Hizb ut-Tahrir Indonesia especially on the news "Religion Religion and State" in Rubric Afkar.

Keywords: Discourse Analysis, Hizbut Tahrir Indonesia, Politic

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, proses demokratisasi tidak hanya ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru dan menjamurnya kelompok masyarakat sipil, tetapi juga kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan keagamaan. Terdapat 2 (dua) arus besar dalam wacana ini yang kemudian terpola pada menjadi kelompok yang formalis dan substansialis. Kelompok formalis berkepentingan mengaitkan Islam dan negara secara legal formal, sedang kelompok substansialis lebih mengedepankan substansi Islam dalam Negara.

Perkembangan mutakhir politik Indonesia menunjukkan bahwa agama merupakan suatu institusi politik yang paling penting dalam sistem pancasila, partai politik dan organisasi masyarakat berbendera agama makin marak, masif, dan eskalatif dalam memikat massa. Celaknya, partai politik dan ormas yang berbendera agama tersebut tidak menjadikan rakyat sebagai insan politik yang beradab, melainkan di jadikan massa kerumunan untuk pertarungan kekuasaan, suatu karakter rezim *Orbarian*; Dault (2005 ; 96).

Jika di lihat dari jumlah pemeluknya Indonesia merupakan Negara yang paling besar jumlah penduduk muslim di seluruh dunia. Namun, jika di nilai secara religi politik dan ideologis, Indonesia bukanlah sebuah "Negara Islam". Ia adalah Negara yang di dasarkan atas ideologi Pancasila, yang mana ideologi Pancasila telah di tetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sudah melalui proses panjang sebelumnya (Zamharir, 2004 : XV).

Koordinator Lajnah Khusus Intelektual MHTI Jawa Barat, Indira S. Rachmawati pun pernah menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang sudah di jalankan selama puluhan tahun di Indonesia telah nyata gagal membawa kesejahteraan yang hakiki bagi rakyatnya (Al – Amin, 2013 ; 33). Melalui pernyataan di atas, dapat di simpulkan bahwa bagi Hizbut Tahrir Indonesia sistem demokrasi bukanlah sistem yang baik untuk di terapkan di Indonesia. Adapun dipilihnya gerakan Hizbut Tahrir dalam studi ini adalah dikarenakan gerakan yang cenderung menentang sistem yang telah ditanamkan. Selain itu, kelompok ini pun merupakan kelompok yang cukup kontroversial. Dilansir dari laman detik.com juga dijelaskan bahwa beberapa negara juga melakukan penolakan terhadap organisasi ini. Terlebih karena organisasi ini dianggap anti pemerintahan dan cenderung memprovokasi.

Pemerintah Jerman pada 2003 lalu, melarang HT melakukan kegiatan. Menteri Dalam Negeri Jerman saat itu Otto Schily menyatakan organisasi tersebut telah menyebarkan kekerasan dan kebencian. Sama

halnya di Jerman, pelarangan organisasi HT juga terjadi di Turki. Pada 2009 lalu, kepolisian Turki menangkap hampir 200 anggota yang dicurigai sebagai anggota HT. Selain di negara Eropa, keberadaan HT juga dilarang di negara-negara Afrika. Seperti yang dilakukan di Mesir. Secara resmi pada 1974, pemerintah Mesir melarang HT setelah ada usaha kudeta. Namun organisasi tersebut semakin aktif karena adanya larangan dan Revolusi Mesir pada 2011.

Begitupun di Indonesia, beberapa waktu yang lalu digemparkan oleh sebuah aksi yang digelar sebuah komunitas yang berjudul “HTI Undercover” kemudian ditambah gemparnya oleh isu pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, media massa memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi yang dibutuhkan masyarakat. Setiap media massa pun memiliki masing-masing karakteristik yang berbeda dalam penyampaiannya (Pasello, 2013:91).

Majalah lebih dahulu melakukan jurnalisme interpretatif ketimbang koran ataupun kantor-kantor berita. Bagi majalah interpretasi justru menjadi saja utama. Sejak lama, aneka majalah sengaja menyajikan tinjauan atau analisis terhadap suatu peristiwa secara mendalam, dan itulah hakikat interpretasi. Tak hanya itu, majalah juga bisa meraih khalayak dari berbagai kelas sosial, tingkat pendapatan atau pendidikan di seluruh penjuru negara (William, 2004 : 192).

Dalam artikel ini peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis milik Teun A. Van Dijk, seorang ahli Sociolinguistik dari Spanyol (Susilo, 2016). Dalam model analisis Van Dijk, ia mengambil analisis linguistik , tentang kosa kata , kalimat, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks (Eriyanto, 2001, :225).

Struktur Makro
Makna global dari suatu teks yang dapat di amati dari topik atau tema yang di angkat oleh suatu teks.
Superstruktur
Kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan , isi, penutup, dan kesimpulan.
Struktur Mikro
Makna lokal dari suatu teks yang dapat di amati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks

PEMBAHASAN

Konsep Relasi Agama dan Negara

Secara umum terdapat tiga macam arus umum wacana (*discourse*) tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, yaitu, pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dengan sistem kenegaraan, wacana yang melihat hubungan komplementer agama dan negara dan wacana yang bercorak integralistik.

Namun, sebelum ketiga arus utama di atas di paparkan, perlu uraian singkat mengenai latar belakang konseptual tentang agama. Karena konsepsi dan definisi membawa implikasi pada perbedaan wacana tentang hubungan agama dan negara.

Konsep pertama adalah konsep agama sebagai konsep ajaran moralitas atau *religion of morality*. Di dalam konsep ini, suatu agama di pandang tidak memiliki doktrin atau ajaran tentang pranata sosial, seperti melalui pranata hukum atau doktrin sosial – politik. Pada peradaban Eropa barat agama tergolong pada ajaran moralitas saja, sedangkan hukumnya berdasarkan hukum romawi.

Konsep kedua adalah agama dengan kandungan (1) ajaran moralitas, (2) pranata sosial, (3) doktrin atau ajaran tentang mode hidup bidang ekonomi, dan juga doktrin tentang kehidupan politik. Sejarah peradaban islam mencatat beberapa doktrin politik. 300 tahun sesudah wafat, Nabi Muhammad SAW islam di pandang memiliki tiga sistem yaitu, keimanan, ajaran moralitas dan hukum atau syari'at (Zamharir, 2004 : 74 – 76).

Kedua konsep hubungan antara agama dan negara yang terpaparkan di atas, mengantarkan pada dua asumsi yaitu, tidak adanya hubungan antara agama dan negara, yaitu agama adalah urusan individu seseorang dan tidak berkaitan dengan pengaturan negara dan yang kedua adalah agama dapat menjadi aspek pengatur kehidupan bernegara.

Analisis Wacana Membongkar Konstruksi Realitas Media

Eriyanto menyatakan bahwa dalam lapangan politik analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa atau politik bahasa. Karena bahasa adalah aspek sentral dalam penggambaran suatu subjek, dan dalam bahasa sebuah ideologi terserap di dalamnya, maka aspek inilah yang di pelajari oleh analisis wacana (Eriyanto, 2005 : 3).

Analisis wacana adalah suatu metode yang biasa digunakan untuk mengkonstruksi makna dalam sebuah wacana yang tersirat dalam sebuah media. Syamsuddin menyatakan bahwa, segi dan sifat analisis wacana dapat di kemukakan sebagai berikut (dalam catatan sobur, 2012 : 49) :

Pertama, analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (*rule of use* – menurut Widdowson). Kedua, analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks , teks dan situasi (*Firth*). Ketiga, analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantic (Beller). Keempat, analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (*what said from what is done* – menurut labov) dan kelima, analisis wacana di arahkan kepada masalah memakai bahan secara fungsional (*functional of language* - menurut Coulthard).

Komunikasi Politik Universal dan Politik Islam

Dalam penelitian ini terdapat dua konsep komunikasi politik, yaitu komunikasi politik universal dan politik Islam. Komunikasi politik secara universal adalah sebuah proses pengoperasian lambang-lambang atau simbol komunikasi yang bersifat politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berfikir serta mempengaruhi sikap dan tingkah khalayak yang menjadi target politik. (Cangara, 2009 : 35).

Sedangkan dalam lingkup politik Islam, politik bermula dari bahasa Arab yaitu siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). (Abdurrahman, 1998:189)

Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *ulil amri* mengurus (yasûsu) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya.

Konsepsi Politik Hizbut Tahrir

Al Amin mengutip dalam kitab Al Dimuqratiyah Nizham al Kufr Yabrum Akhdukhha Tatbiquha aw dakwah ilayha bahwa, “Inti penolakan terhadap demokrasi karena lima alasan, antara lain: pertama, demokrasi adalah ciptaan akal manusia yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan wahyu dan agama samawi.

Kedua, demokrasi muncul dari ideologi sekularisme berupa pemisahan agama dari kehidupan yang pada gilirannya pemisahan agama dari negara. Ketiga, demokrasi berpijak dari kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat sumber kekuasaan. Keempat, demokrasi berpijak kepada hukum mayoritas. kelima : demokrasi mengandung ide kebebasan.”

Beberapa poin mengenai wacana politik Hizbut Tahrir yang dikemas dalam www.hizbuttahrir.or.id adalah, keterpurukan Indonesia adalah karena Neoliberalisme dan Neoimperialisme, tidak ada solusi dan penyelesaian masalah kecuali Islam dan penerapan Syari’ah dan Khilafah, demokrasi adalah sistem kufr, dan merupakan sistem sekuler.

Temuan atas Majalah Al Wa’ie

Secara keseluruhan, majalah al wa’ie adalah majalah yang berisikan artikel – artikel opini Hizbut Tahrir bertemakan mengenai politik dan isu – isu yang berkaitan dengan pemerintahan dan sistem politik. Latar belakang yang menjadi dasar dalam teks ini adalah bersumber dari kemerosotan sistem demokrasi yang di anut oleh bangsa Indonesia saat ini. Sistem demokrasi yang di anut di anggap sebagai sistem sekuler , yaitu sistem yang memisahkan antara agama dengan negara dan kehidupan bermasyarakat. Sehingga Hizbut tahrir yang menyebut diri sebagai organisasi politik merasa bahwa menyampaikan opini tentang buruknya sistem demokrasi adalah suatu hal yang penting. Kemudian mengangkat opini ke permukaan publik bahwa khilafah adalah salah satu solusi yang ampuh untuk menangani permasalahan negeri ini. Tak hanya menyebarkan opini melalui media Hizbut Tahrir saja, HT juga menyebar opini melalui orasi-orasi dan demo yang biasa digelar di gedung pemerintahan.

Jenis tulisan yang digunakan oleh Hizbut Tahrir beragam, Djaruto dan Suprijadi (2003 : 10 – 13) , menyatakan bahwa ada beberapa jenis artikel di dalam sebuah karya tulis, yaitu ; artikel eksploratif, artikel eksplanatif, artikel deskriptif, artikel prediktif dan artikel perspektif. Jika di kategorikan berdasarkan jenis – jenis artikel yang tersebutkan di atas, artikel yang berjudul “Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Islam” di dalam rubrik afkar ini, merupakan jenis artikel eksplanatif. Yaitu, artikel yang menjelaskan mengenai suatu hal kepada pembacanya dan ingin pembacanya benar – benar mengerti sesuatu yang di sampaikan tersebut.

Hampir keseluruhan wacana politik yang diangkat, adalah wacana politik yang menentang sistem pemerintahan dalam lingkup demokrasi. Hizbut Tahrir beranggapan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang memisahkan antara agama dengan negara. Anggapan yang memberangus

perpu-perpu yang mengadopsi nilai-nilai agama Islam. Juga anggapan yang memberangus fakta bahwa Pancasila diadopsi dari agama Islam juga.

Di dalam teori mengenai hubungan antara agama dan negara, ada beberapa teori berbeda yang membahas mengenai keterkaitan keduanya. Di antaranya terdapat teori yang mengatakan bahwa konteks politik itu artinya sangat erat hubungannya dengan negara dan segala aspek yang ada di dalamnya. Di dalam catatan zamharir dikatakan bahwa terdapat beberapa konsepsi mengenai negara dan agama, konsep pertama adalah konsep bahwa bahwa agama adalah murni ajaran moralitas semata dan tidak ada kaitannya dengan pranata sosial maupun kehidupan bernegara.

Konsep kedua adalah yang menyatakan bahwa agama adalah yang mengandung segala aspek kehidupan tidak hanya unsur moralitas semata. Dalam pandangan ini, teks yang berjudul relasi agama dan negara dalam pandangan islam ini memiliki tema yang lebih mengacu pada konsep antara agama dan negara yang kedua. Dalam tema yang di angkat oleh Hizbut Tahrir ini, teks berbicara mengenai fakta, histori dan secara teori mengenai adanya hubungan antara negara dengan agama.

Adapun selanjutnya, perlu diketahui bahwa Hizbut Tahrir merupakan gerakan neo revivalis. Yaitu gerakan yang menjadikan islam sebagai pedoman seluruh sistem kehidupan, gerakan yang kontra terhadap pemikiran – pemikiran non islam atau pemikiran – pemikiran yang bersumber dari pemikiran para teokrat barat. Artinya, tiada sumber hukum yang berasal dari manusia. Pada pendahuluan yang tertuliskan pada pembukaan teks ini penulis sudah mulai memunculkan sebuah kalimat yang tegas mengenai bentuk sebuah negara yang sebenarnya pada kalimat, “*Negara Khilafah merupakan bagian tak terpisahkan dari syariah Islam*”

Dari kalimat di atas, di tarik sebuah makna bahwa satu – satunya sistem kenegaraan yang di anjurkan yang terpisahkan dari sistem syar’i adalah sistem kenegaraan khilafah islamiyah. Pada konteks ini komunikator menjelaskan bahwa negara khilafah adalah bagian dari syari’ah. Negara khilafah yang merupakan obsesi terbesar kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Negara Khilafah yang menjadi bagian dari gerakan politik dan cita – cita untuk mendirikan khilafah islamiyah yaitu kepemimpinan tunggal umat islam setelah khilafah islamiyah di turki utsmani di hancurkan oleh kapitalisme barat (Mufti, 2012 : 243).

Dalam sudut pandang islam, penegakan khilafah merupakan hal yang wajib di lakukan oleh setiap muslim. Namun, metode yang digunakan dalam sejarah penegakan khilafah yang pernah di lakukan Rasulullah SAW dan

generasi generasi penegak khilafah selanjutnya adalah metode i'dad dan jihad fii sabilillah.

Inilah yang membedakan metode penegakan khilafah yang sudah terjadi sebelumnya dengan jalan yang di tempuh oleh kelompok Hizbut Tahrir.

Apabila di hubungkan dengan Indonesia sebagai negara – negara dengan penduduknya yang mayoritas muslim serta pandangan – pandangan yang berkembang di Indonesia seperti nasionalisme dan islamisme, sejatinya tidak akan pernah menemukan titik temu diantara keduanya.

Jika setiap gerakan neo – revivalis yang berpandangan islamisme dan gerakan nasionalis, berjalan dengan ideologinya masing – masing dengan saling menghancurkan satu sama lain, maka akan beresiko pada kesatuan negara republik Indonesia. Hal inilah yang pada akhirnya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini dibutuhkan keselarasan antara kedua gerakan dan pemikiran tersebut untuk tidak memecah belah kesatuan Indonesia.

HTI memunculkan anggapan bahwa keberadaan khilafah merupakan perkara yang fardhu. Penulis artikel yang berjudul relasi agama dan negara dalam pandangan islam ingin menjelaskan bahwa secara histori perilaku sahabat dan para thabi'in menampakkan bahwa keberadaan sebuah negara khilafah merupakan hal yang penting dan bersifat urgen bagi kaum muslimin. Di lanjutkan pada teks selanjutnya adalah penjelasan mengenai histori kaum muslimin yang pernah di perintah oleh khalifah dan hidup di atas kepemimpinan khilafah. Itu merupakan fakta historis, namun sudah terjadi di masa sebelumnya, di gunakan untuk memperkuat gagasan gagasan sebelumnya.

Dalam pra anggapan pada kutipan kalimat di atas, penulis membuat sebuah pernyataan bahwa kehancuran khilafah adalah dikarenakan datangnya ideologi ideologi kufur seperti demokrasi. Ideologi ideologi kufur tersebut menghapuskan aqidah islam sebagai pedoman hidup umat muslim. Namun, pada konteks tertentu, tidak sepenuhnya ajaran islam di hapuskan di dalam suatu pemerintahan, sekalipun pemerintahan tersebut mengadopsi demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Karena di dalam politik indonesia , khususnya demokrasi juga terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan asas – asas islam, salah satunya adalah tentang musyawarah, di dalam demokrasi, musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah untuk menemukan mufakat.

Di dalam history kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat, di zamannya, rasulullah juga menggunakan jalan musyawarah sebagai proses memecahkan masalah hingga mencapai mufakat.

Dalam level stilistik ini, bentuk analisis yang dilihat tak hanya sekedar pilihan kata yang digunakan oleh penulis. Dalam teks ini, penulis banyak menggunakan istilah asing. Istilah asing ini dapat dikelompokkan menjadi dua istilah politik, yaitu istilah politik universal dan politik Islam.

Adapun yang dikategorikan sebagai istilah politik universal adalah penggunaan penggunaan kata sekuler, liberal, neoliberalisme dan kapitalisme. Sedangkan yang tergolong dalam istilah politik Islam adalah kata kuffar, kaffah, khilafah.

Dalam level stilistik, terdapat unsur pilihan kata. Namun, penggunaan kata yang digunakan oleh penulis tak hanya sekedar penggunaan kata saja. Didalam kalimat-kalimat yang terurai dalam artikel relasi agama dan negara, juga terdapat unsur labelling. Asumsi (Esensi) Teori Labelling pada prinsipnya, menyatakan dua hal. Pertama, orang yang berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang lain menilainya. Penilaian itu, ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang lain tersebut. Penilaian tersebut di tentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang tersebut.

Dalam konteks konstruksi teks bahasa pada level labelling, dalam teks artikel relasi agama dan negara, penulis memberikan beberapa label terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam hal ini labeling di kelompokkan menjadi beberapa konsep label. Yaitu, label dalam konsep politik universal dan konsep politik Islam. Menurut Lemert (dalam Sunarto, 2004) Teori Labeling adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label darimasyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud labelling dalam konsep politik universal adalah, penulis menganggap bahwa saat ini, pemerintahan telah melakukan suatu penyimpangan yang sangat besar dengan menerapkan sistem demokrasi. Pada akhirnya, penulis memberi label terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlaku di Indonesia saat ini sebagai sistem liberal, sistem sekuler, sistem kapitalisme. Istilah-istilah yang digunakan tersebut merupakan istilah politik secara universal.

Secara garis besar, teks artikel "Relasi Agama dan Negara dalam pandangan islam merupakan artikel yang bersifat eksplanatif. Dimana dalam sebuah artikel eksplanatif berisikan sebuah paparan atau penjelasan

tentang inti tulisan yang ingin disampaikan. Dalam artikel ini tidak ada grafis yang menceritakan isi artikel seperti pada beberapa artikel lainnya. Dalam teks ini juga tidak memuat kalimat-kalimat yang mengandung unsur metafora atau penggunaan kalimat-kalimat perumpamaan untuk menjelaskan maksud. Jadi didalam artikel ini murni penjelasan secara gamblang tentang bagaimana relasi agama dan negara dalam pandangan islam sesuai dengan konteks pemingkiaan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan penyampaian ideologi Islam mengenai khilafah al minhaj nubuwah yang merupakan kewajiban bagi setiap umat islam untuk memperjuangkannya adalah sebuah kebenaran. Namun di dalam penegakannya Rasulullah sudah mengajarkan metode penegakan khilafah yakni dengan l'dad dan jihad fii sabilillah.

Sejauh dari analisis teks didalam media Hizbut Tahrir Indonesia , begitu banyak doktrin yang memprovokasi keadaan indonesia di masa kini. Seolah dari teks teks yang di munculkan tersebut malah terkesan seperti *hatespeech* yang di tujukan kepada pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, M.S., (2013), *Resolusi Neo – Metode Riset Komunikasi Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, H. (1998), *Islam: Politik dan Spiritual*. Singapura: Lisan Ul-Haq.
- An – Nabbhani, T. (2001). *Ma Fahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- _____. (2001). *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Al – Amin, Rofiq. (2013). *Jurnal Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir Vs Religius Modern Salafi ala Muslim Iran* ,Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Budiarjo, M. (1977). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djuroto , T. dan Suprijadi, B. (2003). *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. Bandung: Rosdakarya.
- Mufti, M. (2015). *Sejarah dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Maksudi, B. I. (2012). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rais, M. D. (2001). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sobur, A. (2012), *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosdakarya.
- Susilo, D. (2016). Perempuan dan Korupsi: Wacana Media Dalam Berita Tindak Pidana Korupsi Perempuan (Women and Corruption: Media Discourse on News Reporting about Women's Corruptor). Yayasan Jurnal Perempuan, 23-24 September 2016.